

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA BANGUNREJO KABUPATEN KENDAL

Rizzal Firmanudin¹, Maulida Putri Rahmawati², Suprihatma³

^{1,2,3} Universitas Selamat Sri

Correspondence author: maulidaputri2791@gmail.com

Kabupaten Kendal, 51351, Indonesia

Abstract

This research was conducted in Bangunrejo Village, Patebon District, Kendal Regency. This study aims to determine how the implementation of Village Owned Enterprises (BUMDes) policies in Bangunrejo Village, Kendal Regency. in the process of a good waste management unit and have carried out the correct procedures so that in the future they can turn the waste management unit into waste processing to improve the economy of the people of Bangunrejo Village. Therefore, research related to policy implementation at BUMDes Bangun Karya was carried out. This study uses Mariiee S. Grindle's theory of policy implementation, namely implementation which is influenced by two variables, namely the policy content variable (content) and the policy environment (context). The data collection techniques are observation and interviews which are then processed and analyzed qualitatively. In collecting interview data, it was carried out in Bangunrejo Village, Kendal Regency. The results of this study are: (1) the driving and inhibiting factors for the implementation of the BUMDes policy of the waste management unit are still constrained by the limited tools needed for good waste management in order to improve the community's economy (2) The role of the community is very important in the success of the BUMDes waste management unit so that can improve the economy of the community and village.

Keywords: Bangunrejo Village; Policy Implementation; Village Owned Enterprises (BUMDes)

Abstrak

Penelitian ini di lakukan di Desa Bangunrejo, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal. di dalam proses unit pengelolaan sampah yang baik dan sudah melakukan prosedur yang benar supaya kedepan bisa menjadikan unit pengelolaan sampah menjadi pengolahan sampah untuk memberikan peningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bangunrejo. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan pada BUMDes Bangun Karya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Mariiee S. Grindle yaitu implemtasi yang dipengaruhi oleh dua variabel yaitu variabel isi kebijakan (content) dan lingkungan kebijakan (contex). Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dalam pengumpulan data wawancara dilakukan di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini adalah: (1) faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan BUMDes unit pengelolaan sampah masih terkendala oleh terbatasnya alat alat yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah hyang baik supaya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (2) Peran mayarakat sangatlah penting dalam mensukseskan BUMDes unit pengelolaan sampah agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Desa Bangunrejo

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk membangun kemandirian desa diantaranya pembangunan disetiap sektor termasuk pembangunan perdesaan. Peran pemerintah adalah membangun daerah perdesaan, dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan perekonomian masyarakat desa. Tersedianya sarana dan fasilitas dalam rangka mendukung pencapaian kesejahteraan perekonomian masyarakat desa dapat membangun serta memperkuat institusi yang telah mendukung proses produksi dan pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa. Tujuan dilaksanakan pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia, ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia didorong dengan saling memperkuat, berkaitan, dan terpadu terhadap bidang lainnya. Hal ini dilakukan selaras guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatkan ekonomi nasional akan tercapai melalui bagaimana cara kesuksesan ekonomi di tingkat daerah. (Muhammad Adib Junaidi, 2018).

Undang undang Nomor 6 tahun 2014 menyebut bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan besar pembangunan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi local serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan kekeluargaan serta gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan realitas di atas maka lahirlah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang merupakan perwujudan sesuai dengan amanat dari UUD No 6 tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes di bentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong yang ada potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, sumber daya alam, serta sumber daya manusia dalam rangka mensejahterakan masyarakat perdesaan. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa perlu di dukung oleh pihak pemerintah, sebagai basis pengembangan industry kecil menengah kebawah ataupun UMKM yang diharapkan dapat melahirkan produk-produk unggulan lokal yang mampu menjadi citra positif dalam kompetensi pasar (Harmiati,dkk).

Keuangan desa yang di dapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah di kelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa, namun kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun

pemerintahan daerah karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi adminitratif, sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik di dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu strategi dalam memudahkan desa mendapatkan sumber dana adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut salah satunya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pemerintahan desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa, serta memenuhi kebutuhan dan mengali potensi desa. Undang – Undang tersebut memayungi peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa BUMDes yaitu instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan potensi dimiliki oleh desa, pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi disamping itu keberadaan BUMDes juga mempunyai dampak meningkatkan sumber pendapatan asli desa (PAD) memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan serta untuk meningkatkan kesejahteraan secara lebih optimal. (Eka Nurcahya 2019: 2). Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat desa yaitu dari desa oleh desa untuk desa. Implementasi BUMDes menampung kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat dalam kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional dengan kerjasama masyarakat dan pemerintahan desa. Peluang BUMDes sangat besar untuk menjadi pilar kemandirian bangsa sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kemandirian, kebersamaan gotongroyong antara pemerintahan desa dengan masyarakat yang mengembangkan perekonomian masyarakat dan desa, BUMDes berperan terhadap penanggulangan kemiskinan serta mencapai kesejahteraan masyarakat.

Drs. Mardi Eko Susilo menjelaskan bebasnya Kendal dari desa tertinggal pun banyak didukung dengan perkembangan BUMDes yang kini menjadi 136 di seluruh kabupaten Kendal. Dikatakan kabupaten Kendal mewajibkan seluruh desa untuk membentuk BUMDes guna mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dengan demikian selain pembangunan infrastryuktur dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakan perekonomian secara

berkelanjutan, Anggaran bantuan lainnya disalurkan untuk peberdayaan ekonomi desa diantaranya melalui UMKM sesuai potensi dan kondisi desa. (Muhammad Adib Junaidi, 2018).

Maka dari itu peran pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya menaungi kegiatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan dari kegiatan di lembaga ini tidak bisa terlepas dari peran pemerintah desa yang memberikan dorongan untuk pengurusan agar bersikap profesional dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat desa. Dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa sehingga desa mendapatkan penghasilan dari usaha ekonomi masyarakat. (Disty Purnamasari, 2015).

Regulasi yang melahirkan program BUMDes salah satunya yaitu UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dimana prioritasnya penggunaan dana Desa tahun 2020 yaitu dengan pembentukan BUMDes dan pengembangan BUMDes.

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dana desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 yaitu pembangunan tempat pembuangan sampah serta daur ulang sampah untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Namun meski demikian pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Bangunrejo ini Bukan Tanpa hambatan, berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan perangkat desa pada tanggal 4 Juni 2020 kaitanya dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangunrejo dapat dilihat bahwa BUMDes desa Bangunrejo kurang maksimal. Hal ini dinyatakan oleh salah satu perangkat desa yang menyatakan bahwa kurangnya pengelolaan sampah menjadi pengolahan yang kurang maksimal karena saat ini sampah hanya di kumpulkan di tempat sampah kemudian di buang di tempat pembuangan akhir.

Desa Bangunrejo merupakan salah satu desa di utara dari kabupaten Kendal yang letaknya di kecamatan patebon, dimana masyarakatnya banyak berprofesi sebagai petani, buruh tani dan sebagai wirausaha. Desa Bangunrejo memiliki luas 134.13 Hektar dan pernah mendapatkan sebuah penghargaan sebagai peserta terbaik pada festival BUMDes tingkat kabupaten pada tahun 2017 yang lalu. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 72 tahun 2005, tentang sumber pendapatan desa dalam peraturan daerah kabupaten, program BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa sesuai dengan potensi desa, dibangun atas inisiasi masyarakat serta mendasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif. Melalui website resmi Desa Bangunrejo, termasuk desa yang sudah mengelola BUMDes dengan baik dimana ada empat unit usaha yang di kelola oleh BUMDes. (Abim Salabim, 2017).

Tabel 1. Daftar Unit Kerja BUMDes Bangun Karya Desa Bangunrejo Tahun 2020

No	Program Unit Kerja BUMDes
1.	Unit Pertanian
2.	Unit Air Bersih
3.	Unit Pengelolaan Sampah
4.	Unit Simpan Pinjam

Sumber : Data Unit BUMDes Bangunrejo

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menjelaskan beberapa program unit bumdes yang berada di desa Bangunrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, program Unit BUMDes yang pertama yaitu Unit Pertanian, Unit air Bersih, Unit pengelolaan Sampah dan Unit Simpan pinjam.

Adapun hambatan dari unit - unit program BUMDes di Desa Bangunrejo yaitu :

1. Unit Pertanian

Kendala yang di hadapi jika musim kemarau di aliran pertanian sangat sulit mendapatkan air untuk pengairan sawah yang ada di desa bangunrejo pada musim kemarau dan jika memasuki musim pengujan sawah di desa bangunrejo terkena banjir, dari jumlah penduduk 1656 desa Bangunrejo sebanyak 39 orang menjadi petani serta buruh lepas sebanyak 204 orang. Namun kendala yang dihadapi di unit kerja pertanian dapat diatasi dengan baik dengan cara buka tutup pintu irigasi di sungai sungai kecil untuk perairan sawah.

2. Unit Usaha Air Bersih

Ada 3 sumur bor didesa bangunrejo kendala yang dihadapi yaitu jika aliran listrik padam keluarnya air kurang maksimal kemudian perlu perawatan supaya tidak berlumut di tandon air yang digunakan untuk masyarakat, Masyarakat desa Bangunrejo keseluruhan menggunakan air bersih dari unit usaha air bersih dan setiap bulan membayar sesuai dengan pemakaian yang masyarakat gunakan. Pelaksanaan unit air bersih sudah berjalan dengan baik yang dirasakan semua warga Desa Bangunrejo.

3. Unit Simpan Pinjam

Banyak masyarakat desa bangunrejo yang pinjam ke unit simpan pinjam guna untuk permodalan awal pertanian ataupun modal usaha. Sehingga pelaksanaan unit simpan pinjam berjalan dengan baik terutama untuk masyarakat Desa Bangunrejo untuk modal usaha

4. Unit Pengelolaan Sampah

Kendala Yang dihadapi selama ini di desa bangunrejo untuk pengelolaan sampah kurangnya tenaga ahli untuk memproses sampah yang ada di masyarakat desa Bangunrejo.

Dari 4 unit Badan Usaha Milik Desa Desa Bangunrejo yang kurang berjalan dengan baik yaitu unit pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang baik hendaknya bisa menambah peningkatkan perekonomian masyarakat dan Desa Bangunrejo. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, unit program yang menjadi prioritas dan paling bermasalah pada BUMDes di Desa Bangunrejo yaitu pengelolaan sampah, unit ini menjadi penting untuk masyarakat Desa Bangunrejo karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ataupun Desa Bangunrejo. Pengelolaan sampah pada BUMDes Desa Bangunrejo dapat menghasilkan berbagai manfaat seperti pengolahan sampah menjadi pupuk ataupun menjadi kerajinan dari bahan botol bekas, namun kurangnya tenaga ahli untuk memproses sampah mengakibatkan menurunnya perekonomian ataupun tidak maksimalnya pengelolaan sampah yang seharusnya bisa menjadi pemasukan dana tambahan ke masyarakat dan Desa melalui BUMDes unit pengelolaan sampah.

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh, Nisfi Fahriani dkk (2018:224) masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah, maka masyarakat perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya pengelolaan sampah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pengelolaan sampah dilakukan oleh masyarakat adalah penanganan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi sampah secara terorganisir, melalui tahap pengumpulan, pengelolaan, serta memproses akhir sampah yang sudah dihasilkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal khususnya di unit pengelolaan sampah, yang seharusnya bisa menjadi keuntungan perekonomian masyarakat dengan pengelolaan limbah sampah yang maksimal. Oleh karena itu saya akan meneliti tentang pengelolaan sampah di Desa Bangunrejo yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyumbang dana desa Bangunrejo.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal. Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan tindakan, membuktikan teori, dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di

bidang atau studi. Beberapa hal yang menunjukkan pentingnya penelitian, di antaranya adalah: Sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono:2011).

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana BUMDES di Desa Bangunrejo sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Bangunrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Metode penelitian kualitatif ini sangat cocok untuk situasi ini. Karena sifatnya yang lengkap, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti menggali informasi lebih dalam terkait topik penelitian, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Keempat komponen analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara simultan, artinya bahwa pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka sekaligus juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan dikemukakan mengenai hasil wawancara dan observasi di lapangan. Pada penelitian ini seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya yaitu apa faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah. Identitas informan penelitian diuraikan data-data hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil wawancara di lapangan, wawancara dilakukan dengan 4 orang informan yang terdiri atas kepala desa Bangunrejo, perangkat desa Bangunrejo, ketua Badan Usaha Milik Desa dan Pekerja Badan Usaha Milik Desa unit pengelolaan sampah serta masyarakat.

Data penelitian primer dalam penelitian berasal dari wawancara dengan para informan yang dinilai berkompeten di dalam pengelolaan sampah untuk memberikan data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian, data ini sudah dikumpulkan serta telah disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

Tabel 2. Data Informan Unit Pengelolaan Sampah

No	Nama	Alasan
1	Bapak Subur	Merupakan kepala desa Bangunrejo yang mendukung adanya BUMDes Unit Pengelolaan Saampah
2	Bapak Jamil	Merupakan perangkat desa Bangunrejo bidang pemerintahan desa
3	Bapak Basid	Merupakan ketua unit BUMDes yang ada di desa Bangunrejo
4	Petugas sampah/ Masyarakat	Merupakan petugas kebersihan dan selaku masyarakat desa Bangunrejo

Sumber : Wawancara Informan

Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Desa Bangunrejo

Pembangunan merupakan usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Salah satu misi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi negara adalah melalui pembangunan pedesaan. Wujud dari pembangunan desa yaitu adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Dengan demikian, program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan implementasi yang berada di desa Bangunrejo berjalan dengan baik dengan adanya BUMDes masyarakat sangat terbantu dan memberikan solusi akan permasalahan yang dialami masyarakat, BUMDes Bangun Karya memiliki 4 unit usaha yaitu, pertanian pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, dan simpan pinjam. Selanjutnya dari ke-4 unit BUMDes tersebut yang pendapatannya paling kecil yaitu unit pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian dari implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal maka peneliti akan membahas lebih lanjut berdasarkan sub-sub berikut:

Pembangunan Bank Sampah

Pengelolaan sampah tertuang dalam Undang –Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah pasal 19 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Pasal 20 tentang

pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan penimbunan sampah, pendaur ulang sampah serta pemanfaatan kembali sampah. Di Desa Bangunrejo sendiri belum terdapat bank sampah yang seharusnya bisa menjadikan peningkatan perekonomian masyarakat dan untuk saat ini pengelolaan sampah yang ada di Desa Bangunrejo kurang maksimal.

Mesin Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah juga dijelaskan dalam pasal 22 tentang penanganan sampah, meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan proses akhir sampah tempat pembuangan akhir sangat berperan penting dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil dari wawancara bersama Kepala Desa Bangunrejo, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam upaya mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan segala potensi sumberdaya ekonomi yang ada di Desa Bangunrejo. Selanjutnya untuk rencana adanya bank sampah di Desa Bangunrejo kemungkinan besar pada tahun 2020 bisa dilaksanakan.

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah

BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui bahwa tujuan pendirian BUMDes bukan merupakan usaha yang mengambil alih usaha-usaha yang berkembang dalam masyarakat. BUMDes yang didirikan untuk mendukung dan memperkuat usaha-usaha yang berkembang dalam masyarakat. Untuk pendapatan dari keseluruhan unit BUMDes Bangun Karya pada tahun 2020 berhasil mendapatkan ±50jt pertahun akan tetapi unit pengelolaan sampah yang ada di Desa Bangunrejo untuk saat ini terbilang masih daripada pendapatan BUMDes 3 unit lainnya.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah

Progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berawal dari perhatian pemerintah kepada desa untuk menumbuhkembangkan desa di era globalisasi ini. Salah satu bentuk pengembangan desa yaitu dengan terbentuknya BUMDes sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Selanjutnya dalam hal ini peneliti akan membahas fokus penelitian tentang teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Menurut Grindle suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi dari kebijakan (*content of policy*) serta konteks implementasinya (*context of implementation*), di dalam teori ini bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasarannya yang sebelumnya sudah diperinci progam aksi sudah dirancang dan sejumlah dana sudah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan serta sasaran yang tepat (Wibawa, 1994:127) .

Isi Kebijakan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi kebutuhan desa dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepentingan Kelompok

Kepentingan kelompok adalah variabel yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target termuat dalam menentukan tujuan yang akan disepakati oleh semua kelompok kearah mana tujuan itu akan dicapai. Masyarakat di Desa Bangunrejo sangat terbantu akan adanya pengelolaan sampah dimana kelompok masyarakat bisa mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Walaupun masih ada yang tidak setuju pada awal pendiriannya pengelolaan sampah di Desa Bangunrejo.

Berdasarkan tujuan ini pelaksanaan BUMDes Bangun Karya belum mampu memberdayakan seluruh masyarakat desa, karena masih terkendala oleh dana dan sumber daya manusia. Saat ini BUMDes baru bisa berjalan apa adanya dengan fasilitas pendukung yang seadanya.

Jenis Manfaat Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Bangunrejo

Melalui adanya BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bangunrejo banyak *manfaat yang dinikmati oleh masyarakat seperti air bersih yang seluruh masyarakat menggunakan air sumur bur milik BUMDes Bangun Karya serta tiga unit usaha lainnya yang ada di Desa Bangunrejo*. Manfaat lain yang didapatkan yaitu masyarakat sangat terbantu sehingga tidak membuang sampah sembarangan lagi dan banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat salah satunya berupa lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya dalam implementasi kebijakan tentang BUMDes di Desa Bangunrejo pada tahun ke tahun mengalami peningkatan dan sudah berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Bangunrejo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah

Pemerintah Desa Bangunrejo dalam pengelolaan sampah sejauh ini belum efektif sehingga belum bisa meningkatkan pendapatan desa, dalam segi pengoprasian pengelolaan sampah sudah baik, namun disisi lain ada beberapa faktor yang menghambat yang belum terselesaikan kebijakan pengelolaan sampah saat ini dianggap sangat baik oleh masyarakat, namun kebijakan ini akan berjalan dengan baik apa bila indikator indikator dalam kebijakan terpenuhi dengan baik. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplemesian kebijakan pengelolaan sampah yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat Desa Bangunrejo, kurangnya sumber daya manusia dan alat yang kurang dalam manajemen pengelolaan sampah, kurangnya bantuan dana dari pihak luar. Dan ada masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat serta kurangnya sanksi untuk membuang sampah sembarangan. Pengelolaan sampah yang di lakukan di Desa Bangunrejo sejalan dengan ketentuan dari Undang Undang dalam pengelolaan sampah, yang harapanya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Bangunrejo

2. Faktor – faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah

- a. Kepentingan kelompok di Desa Bangunrejo sudah berjalan sangat baik dibuktikan adanya 4unit BUMDes yang sudah berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan untuk meningkatkan ekonomi hingga menjadikan desa bangunrejo juara 1 tingkat kabupaten dalam perlombaan BUMDes akan tetapi masih banyak kekurangan di dalam pelaksanaannya.
- b. Jenis pemanfaatan bagi masyarakat Desa Bangunrejo sangatlah terbantu adanya BUMDes di karenakan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bangunrejo.
- c. Perubahan yang diharapkan oleh masyarakat dalam kebijakan BUMDes akan ditahun tahun yang akan datang semakin baik yang berdampak kelingkungan serta bis meningkatkan perekonomian masyarakat.
- d. Pelaksanaan program di Bangunrejo pada awal berdirinya BUMDes lambat tahun semakin bagus serta hasil dari pendapatan asli desa meningkat.

- e. Letak dari pengambilan keputusan awal berdirinya BUMDes unit pengelolaan sampah, pengangkutanya menggunakan grobak hingga kepala Desa Bangunrejo mengambil keputusan untuk membeli mobil untuk pengangkutan sampah
- f. Dukungan sumber daya pada dasarnya di Desa Bangunrejo terdapat banyak sumber daya yang bisa di olah menjadi nilai ekonomi yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat akan tetapi dalam unit pengelolaan sampah kurang maksimalnya pengelolaannya menjadikan pengolahan dikarenakan tidak adanya mesin pengelolaan sampah dan minim pekerja untuk pengelolaan sampah.

Adapun saran dan rekomendasi terkait dengan temuan penelitian yakni :

- a. Pemerintah Desa harus lebih berperan banyak lagi untuk pengembangan unit pengelolaan sampah menjadi pengolahan sampah supaya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Bangunrejo dan pengolahan sampah yang baik bisa dirasakan semua masyarakatnya sehingga pemerintah berjalan dengan baik dan masyarakat sejahtera.
- b. Harus saling dukung untuk mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan desa.

REFERENSI

- Eko. 2013. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Karangkretek Gunung Kidul Yogyakarta". *Jurnal Kebijakan*: Vol. 1 No. 1 : 33-50
- Fahriani A, Nisfi, dkk. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Desa Wisata Ciburial Kecamatan Cimendan Kabupaten Bandung". *Jurnal Pengelolaan Sampah*: hal 224.
- Grindle, merille S. (ed), 1980, *Politic and Policy Implementation in the Third Word*, New Jersey: Princeton University Press.
- Junaidi, Muhammad Adib. 2018. *Peran Badan Usaha Milik Desa*.
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130>.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purnamasari, Disty. 2015. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar) vol. 3 no.10.
- Ramandan Cristya Berlian, dkk. " Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa". *Jurnal of Applied Setences Research*: Vol 2 (1), Hal 58-66

Salabim Abim. 2017 " Permasalahan Sampah dan Limbah jadi Kendala Kendal Menjadi Kota Tanpa Kumuh", dalam Swara Kendal".

<https://swarakendal.com/2017/03/02/permasalahan-sampah-dan-limbah-jadi-kendala-kendal-menuju-kota-tanpa-kumuh/12>

Samodra Wibawa. 1994. Kebijakan Publik :Proses dan Analisis, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia

Sucipto, Cecep Dani. 2012. Teknologi Pengelolaan Daur Ulang Sampah. Yogyakarta: Gosyen Publising.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta

Wahyudi, A. 2016. "Implementasi rencana strategi badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan BUMDES di Kabupaten Kota Waringin Barat".